



Problem Pengajaran Sastra di SMK

Teguh Trianton *)

*) Penulis adalah Sarjana Pendidikan (S.Pd.), pernah bekerja sebagai wartawan. Kini menjadi guru Bahasa dan Sastra Indonesia pada SMK Widya Manggala Purbalingga. Buku antologi yang memuat karyanya; puisi "Jiwa jiwa Mawar" (Bukulaela, 2003), "Untuk Sebuah Kasihsayang" (Bukulaela, 2004), antologi "Puisi Penyair Jawa Tengah: *Pendhapa-1*" (TBJT 2005), Kumpulan Cerpen (Kumcer) "Robingah Cintailah Aku" STAIN Purwokerto Press (Grafindo 2007), antologi "Temu Penyair Antar Kota: *Pendhapa-5*" (TBJT 2008).

Abstract: At high-school vocational education, literary lesson didn't have yang proper portion. This is a serious problem, if education wishes to build nation character by humanizing human. The problem at vocational education is, at its 2004's curriculum that Indonesian language lesson fully directed to one direction, namely using utilizing right and roper Indonesian language to communicate at work. Therefore, it's the time for government and education department to reformulate or revitalize the real education goal, by equalizing all matters and lesson even if that lesson didn't tested at national test (UN). Teacher also must apply curriculum with flexibility and wise, because curriculum inst a sacred text that annul interpretation and difference on its realization. **Keywords:** *vocational education, literary lesson, curriculum.*

Hubungan bahasa dengan sastra Indonesia pada dasarnya serupa dua sisi mata uang logam. Keduanya saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Sastra merupakan sistem tanda yang mempunyai makna dengan bahasa sebagai mediumnya (Pradopo, 1995). Bahasa sendiri tidaklah netral, sebab sebelum jadi anasir dari bangunan karya sastra, bahasa telah memiliki arti tersendiri (*meaning*) berdasarkan konvensi bahasa tingkat pertama melalui pembacaan *heuristik*.

Sumbangan sastra sendiri terhadap khazanah bahasa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Konvensi-konvensi sastra dengan sendirinya memberikan *sokongan* yang besar bagi perkembangan bahasa.

Dalam pendidikan, nilai estetik dan puitik sastra selama ini diyakini mampu memompa dan membangun karakter manusia. Bahkan, mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kenedy (JFK) begitu yakin bahwa sastra mampu meluruskan arah kebijakan politik yang bengkok sehingga politikus yang mati tertembak ini mengatakan, "Ketika Politik Bengkok, Sastra akan Meluruskannya".

Begitu pentingnya sastra bagi kehidupan sehingga Seno Gumira Ajidarma (1997) kemudian mengafirmasi pernyataan JFK dengan membuat adagium "Ketika Jurnalisme Dibungkam, maka Sastralah yang akan Berbicara". Sastrawan yang juga jurnalis ini tidak main-main dengan statementnya, kumpulan Cerpen *Saksi Mata* (1994) terbitan Bentang Budaya Yogyakarta adalah 'saksinya'. Seluruh cerpen dalam kumpulan ini merupakan 'pembocoran' fakta peristiwa kekerasan yang terjadi di Dili - Timor Lorosae saat itu.¹



Dalam banyak kesempatan, sastra menjadi bahasan yang tidak pernah kering, mulai ihwal pembabakan dalam sejarahnya, rendahnya kritik, dan apresiasi hingga polemik seputar tema serta *mainstream* arah pergerakan perkembangan sastra mutakhir.

Pada tahun 2001, sastrawan sekaligus kritikus sastra, Agus R Sarjono, sempat menuturkan bahwa telah terjadi disorientasi dalam pengajaran sastra di sekolah (Sarjono, 2001). Diungkapkan bahwa gagalnya pengajaran sastra di sekolah lebih banyak terjadi akibat kesalahan guru di sekolah yang telah mengingkari hakikat yang melandasi lahirnya pengajaran sastra ini.

Oleh karena itu, sudah selayaknya pengajaran sastra harus mempertanyakan ulang seluruh landasan meng-ada-nya, jika tidak ingin jatuh pada persoalan yang sama berupa gagalnya pengajaran sastra yang tidak kunjung selesai. Selama ini, meski polemik, seminar, dan lokakarya telah digelar bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, namun pengajaran sastra sangat awam, hanya membahas strukturnya saja (intrinsik dan ekstrisik) secara awam. Sastra dianggap sebagai sesuatu yang lahir dari kekosongan budaya dan otonom, sehingga dianggap tidak ada intertekstualitasnya dengan teks-teks lain, diskursus lain.

Begitu pentingnya sastra, hingga perguruan tinggi membuka fakultas sastra. Di tiap daerah berdiri komunitas-komunitas sastra. Kampus menjadi kantong-kantong 'basis' kehidupan sastra. Bahkan, sistem pendidikan kita memasukkan sastra sebagai muatan pelajaran dalam kurikulum, meskipun masih *mendompleng* pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, setidaknya sastra diajarkan pada siswa di sekolah.

Kondisi ini kemudian memaksa kita untuk menelan kegalauan. Kondisi pengajaran sastra masih mengecewakan,² dan ini dirasakan oleh sastrawan, pemerhati atau kritikus sastra, masyarakat, siswa, dan bahkan guru sendiri.³ Hal ini adalah kondisi pada tahun 1980-an, yang didasarkan pada sejumlah penelitian yang saat itu dilaksanakan. Namun, kondisi ini agaknya masih terus berlangsung hingga sekarang. Bahkan, kondisi pengajaran sastra di sekolah saat ini tidak jauh berbeda atau justru kian memprihatinkan.

Dalam tulisan berbeda, Ahmadun Yosi Herfanda⁴ (2007) menggambarkan kondisi terkini pengajaran sastra di sekolah. Dalam makalahnya, ia mengungkapkan bahwa pengajaran sastra di sekolah sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Indikator utama yang memperkuat sinyalemen itu adalah masih rendahnya apresiasi dan minat baca rata-rata siswa dan lulusan SMU terhadap karya sastra.

Bahkan, dalam aspek pengetahuan sastra saja, mereka umumnya juga masih sempit, tidak seluas pengetahuan mereka tentang dunia selebriti. Mereka umumnya lebih mengenal siapa Britney Spears atau Westlife di negeri Paman Sam daripada Abdul Hadi WM di negeri sendiri.

Kondisi Pengajaran Sastra di SMK

Diskursus dan polemik seputar pengajaran sastra yang selama ini menguat, baik dalam forum seperti diskusi, atau seminar, dan muncul di media masa selalu mengambil contoh kondisi pada Sekolah



Menengah Atas (baca: sekolah umum). Jarang sekali, atau bahkan belum ada kritisi sastra dan kritisi pendidikan yang menyoroti problem pengajaran sastra yang sesungguhnya jauh lebih besar dan lebih berbahaya bahkan akut, yaitu kondisi pengajaran sastra pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pembangunan pendidikan ke depan diorientasikan pada upaya peningkatan jumlah sekolah kejuruan dengan perbandingan 70:30 dari jumlah SMA. Kondisi saat ini 60 : 40. Artinya, perbandingan jumlah siswa SMK juga akan lebih banyak dari siswa SMA/MA. Penggambaran-penggambaran tentang kondisi pengajaran sastra pada sekolah di Indonesia justru masih jauh dari kondisi yang sebenarnya. Dalam pandangan saya, jika melihat perbandingan tersebut bukan tidak mungkin kondisi pengajaran sastra di sekolah di Indonesia justru lebih parah lagi.

Pada Sekolah Menengah Kejuruan; sastra yang notabene bagian tidak terpisahkan dari bahasa dan bangunan pendidikan budaya, serta budi pekerti dan karakter ini, ternyata sama sekali tidak mendapatkan porsi. Tentu saja ini merupakan problem serius yang harus segera di selesaikan, jika pendidikan memang hendak diarahkan untuk membangun karakter bangsa dengan memanusiakan manusia.⁵

Mengingat dalam kurikulum SMK tahun 2004 yang saat ini masih dianut, mata pelajaran bahasa Indonesia sepenuhnya diarahkan pada satu tujuan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk tujuan komunikasi di dunia kerja.

Memang dalam deskripsi pembelajaran bahasa Indonesia SMK terdapat istilah penggunaan bahasa Indah. Terminologi ini secara sadar dipilih untuk menggantikan istilah sastra. Hal ini disebabkan oleh dua alasan pokok, yaitu *pertama*, untuk mencegah kesan ‘menakutkan’ bagi siswa dan guru terhadap sastra, dan kedua, istilah bahasa indah merupakan ancangan yang tepat untuk memasuki dunia sastra. Oleh karena itu, bahasa indah seperti kata-kata mutiara, ungkapan-ungkapan, dan iklan tertentu mulai diperkenalkan pada peringkat Semenjana.

Kemudian, pada peringkat Madya siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan, bentuk-bentuk bahasa indah, dan memahami maknanya. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui kegiatan penugasan di dalam dan di luar modul. Pada peringkat Unggul para siswa dibimbing untuk menggunakan atau untuk memproduksi bahasa indah dalam berbagai kesempatan, seperti dalam membuat catatan harian, majalah dinding, berpantun, musikalisasi puisi, dan drama.

Sayangnya, dari tiga tingkat penguasaan komunikasi; standar atau kualifikasi Semenjana, Madya, dan Unggul, sesungguhnya pengajaran sastra hanya mendapat setengah dari sub-kompetensi dasar yang harus dikuasai pada *level* Unggul, yaitu pada kompetensi dasar apresiasi teks seni.

Padahal, secara keseluruhan dalam tiga standar kompetensi tersebut terdapat 32 kompetensi dasar yang harus dikuasai yang merupakan sub pokok bahasan. Masing-masing terdiri atas 12 kompetensi dasar tingkat Semenjana, 14 kompetensi dasar di tingkat Madya, dan 5 kompetensi dasar di tingkat Unggul.⁶

Sementara pada SMA/MA, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut; (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan



etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.⁷

Kunci Permasalahan

Dalam banyak tulisan, sejumlah kritikus sastra terlanjur menjatuhkan vonis bersalah pada guru sastra atas rendahnya apresiasi siswa terhadap karya sastra.⁸ Dalam pandangan kritikus sastra, kian merananya pengajaran sastra di sekolah lebih banyak disebabkan oleh dua faktor yang bermuara pada guru. *Pertama*, guru sebagai sosok pengajar dianggap kurang memiliki kompetensi dan basis pengetahuan sastra yang mumpuni. *Kedua*, guru dinilai tidak kreatif dalam proses pembelajaran (pengajaran) sastra di sekolah sehingga cenderung membosankan. Hal ini terjadi karena guru dinilai tidak memiliki strategi jitu.

Meskipun belum ada pemetaan terbaru, namun untuk dua penilaian tersebut, sesungguhnya saya cenderung sepakat. Bahkan di lapangan, memang acap kali dijumpai guru sastra (bahasa dan sastra Indonesia) yang enggan meng-*upgrade* pengetahuan mereka tentang seluk-beluk sastra kontemporer.

Namun yang menjadi permasalahan mendasar dalam pandangan saya adalah sistem pendidikan kita. Kurikulum pendidikan yang saat ini dianut tidak pernah memberikan ruang gerak yang leluasa pada pembelajaran sastra. Orientasi pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan masih melenceng jauh dari hakikat tujuan pendidikan itu sendiri. Inilah yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Pendidikan diselenggarakan hanya untuk menciptakan tukang dan mengejar Angka Partisipasi Kasar (APK) semata⁹ sehingga mata pelajaran humaniora seperti sastra, bahasa, seni, dan budaya hanya diletakkan di pinggiran, dianak-tirikan, bahkan dianggap tidak berguna sama sekali. Pengetahuan tentang sastra termasuk apresiasi sastra, dinomorduakan dan dianggap hanya sebagai hiburan. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan guru bermalas-malasan dalam mengajarkan pengetahuan tentang sastra.

Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif, dan menciptakan strategi jitu. Guru juga dituntut mengembangkan kompetensinya sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dari segi isi (materi) maupun kemasannya. Dalam konteks pembelajaran sastra, tentu saja guru dituntut mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta tidak ketinggalan jaman.¹⁰

Namun sayangnya, guru dihadapkan pada seperangkat silabus dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tertentu yang telah “dipatenkan” secara nasional yang berkiblat pada dogma yang dianggap sangat sakral berupa seperangkat kurikulum. Inilah kunci pokok permasalahannya. Silabus dan SKL



inilah yang menghegemoni kreativitas guru sastra sehingga dengan sendirinya pembelajaran sastra di sekolah kian terpinggirkan.

Sistem pendidikan di Indonesia acapkali memaksa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan guru ujung tombak mengingkari hakikat pendidikan. Target perolehan nilai tertentu yang harus dicapai dengan standar penilaian ujian nasional, memicu pengingkaran tujuan pendidikan yang sebenarnya sehingga tidak urung memaksa guru bahasa menomorduakan sastra.

Yang timbul kemudian adalah pragmatisme pendidikan sehingga terjadi distorsi tujuan dan fungsi fundamental pendidikan. Sekolah bukan lagi jalan liberasi dan humanisasi, tetapi justru dibebani tujuan dan fungsi politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomis. Sekolah telah menjadi praktik penindasan kaum kapitalis, dehumanisasi. Kondisi ini jauh-jauh hari, yaitu pada tahun 1970 telah dikritik habis oleh Paulo Freire, dengan mengatakan pendidikan telah jadi bentuk kapitalisme yang licik.¹¹

Sekolah hanya menghasilkan tukang. Parahnya, kualitas akademik tukang-tukang ini hanya ditentukan oleh standar UN. Akibatnya, terjadi penganak-tirian terhadap materi-materi tertentu, dan pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak menunjang capaian ketuntasan belajar versi UN. Semua mata pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan ujian nasional dianggap tidak perlu.

Dus, ujian nasional menjadi tujuan akhir pendidikan, sementara pendidikan karakter, kebebasan berpikir, budi pekerti, berkreasi, dan mengolah emosi, rasa, dan perasaan tidak pernah dianggap penting. Semua termarginalkan oleh target pencapaian nilai Ujian Nasional (UN).

Barangkali kita sempat berpikir, bukankah sastra sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah juga termasuk salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional? Ya! Namun, materi atau soal-soal UN tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan apresiasi siswa. Meskipun di dalamnya terdapat beberapa item soal yang berhubungan dengan sastra, namun lagi-lagi soal tersebut hanya berupa hapalan dan ingatan, tidak pernah berhubungan dengan kemampuan apresiasi, olah rasa, emosi, dan perasaan. Apalagi menyoal ihwal sastra kontemporer.

KTSP

Lalu bagaimana dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? KTSP konon dibuat untuk memberikan ruang gerak yang sebebas-bebasnya pada pihak sekolah, secara otonom untuk menyusun strategi dan menetapkan target pendidikan yang hendak dicapai. KTSP menjanjikan pada guru untuk melakukan berbagai inovasi pendidikan.¹²

Namun, dalam kenyataannya KTSP juga tidak mampu memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk lebih inovatif dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Hal ini terjadi karena lagi-lagi KTSP juga masih turunan dari kurikulum (KBK) yang telah memberikan batasan-batasan tertentu.

Dalam konteks pembelajaran sastra, KTSP sama sekali belum memberikan otonomi pada guru untuk memilih secara bebas dan bertanggungjawab materi-materi (karya-karya) mana yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kondisi kontemporer. Target memenuhi standar ketuntasan



UN sering kali mengalahkan hakikat KTSP. Di samping itu, memang KTSP tidak benar-benar memberikan ruang gerak yang bebas bagi guru dan sekolah.

Alih-alih KTSP menjadi solusi atas kebuntuan dan problem pembelajaran sastra di sekolah, ternyata malah setali tiga uang dengan KBK yang hanya berorientasi pada pencapaian nilai UN.

Sebuah Tawaran

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kesanggupan pemerintah untuk memenuhi besaran anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN merupakan kabar baik, sekaligus tantangan dalam pengelolaan. Di luar kepentingan politis menjelang pemilu 2009, pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2008 lalu menunjukkan optimisme dan keseriusan pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

Namun demikian, orientasi pembangunan pendidikan harus jelas. Selama ini arah pembangunan pendidikan telah keluar jauh dari rel dan mengingkari hakekat pendidikan yang sesungguhnya. Hal ini terjadi terutama pada sekolah kejuruan (SMK/MAK) yang jelas-jelas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar industri.

Ini terlihat jelas dalam penjabaran tujuan SMK. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Sisdiknas, SMK adalah salah satu subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tugas utama SMK adalah untuk mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, mengisi keperluan tenaga kerja terampil tingkat menengah. SMK diadakan untuk tujuan; (1) memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai bekal bagi lulusannya untuk memasuki dunia kerja; (2) memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar bagi lulusannya sebagai bekal dasar untuk mengembangkan kualitas dirinya secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau secara informal.

Inilah bentuk kurikulum yang dalam pandangan Darmaningtyas (2004) dianggap sebagai kurikulum yang menghilangkan rasa seni.¹³ Cikal bakal kurikulum semacam ini menurutnya telah ada sejak berlakunya Kurikulum 1994. Pendidikan diarahkan untuk penguasaan teknologi menjawab kebutuhan industri, sementara nilai-nilai seni sebagai bagian dari kodrat manusia dihapus begitu saja.

Kurikulum macam ini juga berpotensi mengalienasi manusia dari permasalahan kehidupan yang sebenarnya. Pendidikan tidak pernah mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan hidup yang sesungguhnya. Pendidikan baru mampu menjawab tantangan dan permasalahan dunia industri. Kondisi semacam ini telah terjadi sejak tahun 80-an. Rendra (1980) dalam sajaknya mengungkapkan; *Matahari terbit/ Fajar tiba/ Dan aku melihat delapan juta anak-anak tanpa pendidikan// Aku bertanya/ tetapi pertanyaan-pertanyaan/ membentur meja kekuasaan yang macet/ dan papan tulis-papan tulis pendidik/ yang terlepas dari persoalan kehidupan.*¹⁴

Barangkali kita lupa, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berangkat dan berkembang ide kreatif dan inovasi serta pembaharuan sehingga hanya orang-orang yang memiliki kreativitaslah yang mampu menguasai teknologi. Kreativitas merupakan bagian dari seni yang telah ada pada kedirian



manusia sehingga bagaimana mungkin manusia akan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan jika potensi seni yang ada dalam diri tidak pernah dilatih.¹⁵

Memang saat ini kurikulum kita telah mengakomodir pendidikan seni, yaitu dengan kembalinya mata pelajaran seni dan budaya menjadi mata pelajaran di sekolah formal. Namun, lagi-lagi mata pelajaran ini harus termarginalkan oleh tujuan jangka pendek pendidikan kita berupa pragmatisme sempit tentang bagaimana meraih nilai minimal ketuntasan sesuai standar UN sehingga pelajaran seni dan budaya juga bernasib sama dengan pengajaran sastra.

Yang harus dilakukan saat ini adalah mengembalikan arah tujuan pendidikan pada hakikatnya. Hakikat pendidikan menurut ayat pedagogi kritik pendidikan Pennycook (2004) antara lain; *pertama*, pendidikan memproduksi, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga politik. *Kedua*, etika seyogyanya dipahami sebagai sentralnya pendidikan, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengajarkan benar dan tidak benar dalam konteks budaya lokal serta perbandingan dengan budaya lain. Kemudian Pendidikan bertoleransi terhadap perbedaan pada siswa dan guru dalam segala aspek (ras, etnis, bahasa, gender, dll).¹⁶ Dengan kata lain, pentingnya pendidikan multikulturalisme diajarkan di sekolah.

Yang terjadi di lapangan, biasanya guru dan sekolah menganggap kurikulum sejenis kitab suci yang harus dilaksanakan sehingga pendidikan berjalan kaku dan serba wajib. Kondisi semacam ini menuai kritik, pada ayat lain disebutkan bahwa kurikulum tidak boleh dimaknai sebagai teks suci yang tidak memungkinkan lahirnya interpretasi dan perbedaan-perbedaan pada tataran pelaksanaannya.

Pendidikan bukan hanya mengkritisi bentuk ilmu pengetahuan yang ada saja, tetapi meronta, mencari, merumuskan, dan menawarkan bentuk-bentuk baru ilmu pengetahuan. Pendidikan melakukan formulasi ulang terhadap klaim kebenaran yang telah berlaku untuk menemukan kebenaran versi dan interpretasi yang lebih parsial dan khusus dari ilmu pengetahuan, teknologi, kebenaran, dan alasan kebernalaran. Pendidikan bukan hanya mewadahi wacana untuk mengkritisi kemapanan, tetapi menawarkan visi ke depan. Guru melihat dirinya sebagai *'transformative intellectual'*, yaitu intelektual yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan transformasi sosial demi perbaikan.

Dengan merenungkan beberapa ayat pedagogi tersebut, saya berharap institusi pendidikan (sekolah), pemerintah melalui departemen pendidikan, juga guru tidak ragu untuk merumuskan kembali atau merevitalisasi tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Tidak menganak-emaskan materi atau mata pelajaran dan ilmu pengetahuan tertentu dengan alasan karena tidak diujikan secara nasional (UN).

Endnote

¹ Kumpulan Cerpen ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terbit di Australia pada tahun 1995. Buku ini juga mendapat Dinny O'Hearn Prize for Literary Translation (2007) dalam Premier's Literary Award.

² Simpulan ini didasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1978 oleh Yus Rusyana dkk. pada sejumlah sekolah di Jawa Barat, kemudian penelitian J.U Nasution dkk di Jakarta pada tahun 1981, Absul Rahman dkk di Jawa Timur tahun 1981.



³ Agus R. Sarjono, *Sastra Dalam Empat Orba* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), hal. 207-208.

⁴ Tulisan ini merupakan makalah untuk Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra dalam rangka Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia 2007, HMBSI FPBS UPI Bandung, di gedung PKM UPI, 10 April 2007. Tulisan ini juga dimuat secara bersambung menjadi tiga bagian dalam Kolom Budaya *Harian Republika*.

⁵ Simpulan diskursus ini didasarkan pada pendapat sekaligus kritik terhadap kondisi pendidikan kontemporer dari sejumlah tokoh seperi; Ivan Illich yang menyatakan pendidikan dapat menjadi wahana pembebasan manusia, Ki Hadjar Dewantara merumuskan bahwa pendidikan mengasah rasa, karsa, dan cipta manusia, juga Paulo Friere yang menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi praktik pembebasan dan pemanusiaan.

⁶ Silabus Bahasa Indonesia Model KTSP SMK Tahun 2004.

⁷ Ruang Lingkup dan tujuan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMA/MA Kurikulum 2004.

⁸ Baca; "Pengajaran Sastra Kian Merana," Bandung Mawardi, *Solopos* Edisi Minggu, 20 Juli 2008, Hal.V. Dalam esainya, Bandung menilai rendahnya dan termarginalnya pengajaran sastra di sekolah merupakan kesalahan dari guru. Guru dinilai tidak cakap dan kurang kreatif, sehingga pengajaran sastra kian membosankan.

⁹ Kondisi capaian APK melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun hingga tahun 2008. APM SD/MI/Paket A telah mencapai 94,90% dan APK SMP/MTs?Paket B telah mencapai 92,52%. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/SMK/MA/Paket C telah mencapai 60,51% dan pada jenjang pendidikan tinggi telah mencapai APK 17,25%. Sambutan Menteri Pendidikan Nasional Pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 2008.

¹⁰ "Langkah: Pengajaran Sastra Harus Menyenangkan", dalam *Kompas*, Senin, 18 Februari 2008.

¹¹ Lihat juga Mansoer Fakhri, dkk. dalam *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis* (Yogyakarta: ReaD Books: 2001). Ia dengan tegas memberi menyatakan bahwa pendidikan telah mengalami komodifikasi yang mengancam kemanusiaan. Buku ini juga membahas masalah kondisi pendidikan kontemporer yang ditulis oleh Roem Topatimasang dan Toto Rahardjo. Beberapa pemikiran filsafat dan pendidikan barat seperti Paulo Friere menjadi dasar dalam uraian buku ini.

¹² KTSP terdiri atas tujuan pendidikan masing-masing program keahlian, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. SMK mengembangkan KTSP berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite SMK. E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

¹³ Darmaningtyas menyebutnya dengan istilah kurikulum yang menghapus rasa seni dari sekolah formal sehingga disebut memiskinkan rasa seni.

¹⁴ Penggalan Sajak W.S. Rendra, "Sajak Sebatang Lingsong" dalam Kumpulan *Potret Pembangunan dalam Puisi* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1980).

¹⁵ Dalam banyak uraian disebutkan bahwa hakikat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari seni. Pendidikan seni tidak dapat dilepaskan dari pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni akan menyeimbangkan dan membangun karakter manusia. Lihat diantaranya; Khisbiyah, Yayah, (Ed) *Pendidikan Apresiasi Seni; Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, UMS, 2004).

¹⁶ A. Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal. 149-151.

Daftar Pustaka

- Ajidarma, Seno Gumira. 1994. *Saksi Mata*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- . 1997. *Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2008. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung; Rosdakarya.
- Anonim, *Pengajaran Sastra Harus Menyenangkan Kompas*, Senin, 18 Februari 2008
- Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Perss.



- Escobar, Miguel, dkk, (Ed). 1998. *Dialog Bareng Paulo Freire, Sekolah Kapitalisme Yang Licik*. Yogyakarta: LkiS.
- Herfanda, Ahmadun Yosi. 2007. "Menuju Format Baru Pengajaran Sastra", dalam *Makalah Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra dalam Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia 2007*, HMBSI FPBS UPI Bandung, 10 April 2007.
- . "Pengajaran Sastra Berpusat pada Karya Sastra", dalam *Harian Republika*, Minggu, 29 April 2007.
- Khisbiyah, Yayah (Ed). 2004. *Pendidikan Apresiasi Seni; Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, UMS.
- Mawardi, Bandung. "Pengajaran Sastra Kian Merana", dalam *Solopos*, Minggu, 20 Juli 2008.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Toto, dkk. 2001. *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Read Book.
- Rendra, W.S., 1980. *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Sarjono, Agus R. 2001. *Sastra Dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Bentang Budaya.